

**PEMBERDAYAAN LEMBAGA KELUARGA PETANI KOPI MELALUI FAMILY CARE UNIT (STUDI KASUS MASYARAKAT PETANI KELOMPOK KERJA KEN TAWAR DI KAMPUNG LELABU, KECAMATAN BEBESAN, KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH)**

**EMPOWERING OF COFFEE FARMER FAMILY INSTITUTION WITH FAMILY CARE UNIT (CASE STUDY OF COFFEE FARMER KEN TAWAR WORKING GROUP IN KAMPUNG LELABU, DISTRICT OF BEBESAN, ACEH TENGAH REGENCY)**

Nurasih Shamadiyah<sup>1\*</sup>, Achmadi Jayaputra<sup>1</sup> dan Hafni Zahara<sup>1</sup>

<sup>1,3</sup> Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara

<sup>2</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia

\*Email: nurasih@unimal.ac.id

**ABSTRAK**

Komoditas kopi menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kampung Lelabu. Kopi menjadi andalan dalam meningkatkan pendapatan petani dengan penyerapan angkatan kerja di sektor pertanian dan perkebunan adalah 50% dari jumlah penduduk di Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah. Tambahan penghasilan masyarakat petani kopi diperoleh dengan cara memanfaatkan lahan terlantar untuk ditanami hortikultura di saat menunggu musim panen untuk keperluan keluarganya sehari-hari. Masalah yang dihadapi petani kopi adalah proses produksi. Saat ini, petani hanya bisa menghasilkan buah kopi dalam bentuk gelondongan. Padahal petani dapat meningkatkan nilai jual jika petani sudah bisa menghasilkan *green bean* dari kopi tersebut. Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan masyarakat. Terdapat model pemberdayaan keluarga di desa dan kelurahan dengan sebutan *Family Care Unit* (FCU) dengan tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga dengan memanfaatkan potensi sosial setempat. Model pemberdayaan keluarga telah dilakukan sejak tahun 2014 dimaksudkan meningkatkan taraf hidup keluarga petani kopi dengan memanfaatkan potensi dari usahatani kopi tersebut. Kegiatan yang sudah berjalan seperti pendampingan dan peningkatan kapasitas petani kopi dan keluarganya yang dilakukan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Tujuan kajian yaitu untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang dilakukan kelompok kerja Ken Tawar di Kampung Lelabu. Pengumpulan data dan keterangan telah dilakukan melalui studi dokumentasi, diskusi, dan pengamatan langsung ke lokasi. Dari hasil kajian diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan belum dilaksanakan secara maksimal karena kegiatan yang direncanakan belum sesuai dengan rencana, pengurus yang masih memerlukan bimbingan, sumber daya manusia yang kurang memiliki keterampilan, dan terbatasnya dukungan instansi terkait.

Kata kunci: pemberdayaan, keluarga, petani kopi, pendampingan, *family care unit*

**ABSTRACT**

Coffee commodities are the livelihood of most people living in Kampung Lelabu. Coffee is the most contribution to increasing farmer's income by absorbing the workforce in the agricultural and plantation sectors in 50% of the population in Kampung Lelabu, Bebesan District, Central Aceh Regency. The additional income of the coffee farmers community by utilizing abandoned land for planting horticulture while waiting for the harvest season to fill their daily needs. The problem faced by coffee farmers is the production process. At present, farmers can only produce coffee fruit in the form of logs. Whereas farmers can increase the selling value if the farmer can produce green beans from the coffee. Family is the smallest unit in people's lives. There is a family empowerment model in the village and kelurahan called Family Care Unit (FCU) with the aim of improving family living standards by utilizing local social potential. The family empowerment model has been carried out since 2014 intended to improve the living standards of coffee farmer families by utilizing the potential of the coffee farm. The activities such as assistance and capacity building of coffee farmers and their families by the village government in collaboration with universities. The purpose of the study are to find out the empowerment of activities by the Ken Tawar

working group in Kampung Lelabu. Collecting data and information has been done through documentation studies, discussions, and direct observation to the location. From the results of the study it was known that the implementation of activities had not been optimally because the activities were not in accordance with the plan, the management still needed guidance, human resources lacked skills, and limited support from relevant agencies.

Keywords: empowerment, family, coffee farmers, mentoring, family care unit

## 1. PENDAHULUAN

Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial dalam tahun 2013 menyelenggarakan ujicoba model pemberdayaan keluarga melalui kegiatan *Family Care Unit* (FCU) untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial keluarga. Keberadaan *Family Care Unit* dimaksudkan untuk membangun keterpaduan dan sinergitas dalam pemberdayaan keluarga. Tujuannya antara lain ialah untuk meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan keterpaduan yang sinergis dalam upaya pemberdayaan keluarga, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga, dan menumbuh-kembangkan tanggung jawab sosial, kepedulian dan kesetiakawanan sosial.

Model ini memberikan pelayanan dan rujukan terpadu bagi keluarga di tingkat desa atau kelurahan. Pelaksanaannya diperlukan keluarga pionir dan keluarga plasma. Keluarga pionir adalah keluarga berkualitas yang dapat menjalankan peran dan fungsinya, dapat mengatasi masalah dengan cara-cara efektif serta dapat dijadikan sebagai teladan bagi keluarga lain yang memerlukan. Keluarga pionir berperan memberdayakan keluarga plasma. Keluarga plasma adalah keluarga yang kurang mempunyai kemampuan untuk menjalankan peran dan fungsinya, mengatasi masalah dan menjangkau pelayanan sosial.

Diketahui terdapat 33 kelompok kerja atau unit yang dibentuk pada tiap provinsi. Pelaksanaan kegiatan secara serentak dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan Kementerian Sosial. Termasuk pemberian dana. Hanya saja lokasinya sebagian besar berada di ibukota kabupaten, dan sebagian lagi berada di ibukota provinsi atau kota

tertentu. Penentuan tersebut mengacu pada dinas sosial provinsi yang mengarahkan pada wilayah termiskin di daerahnya, sehingga kondisinya tidak sama. Sejak berdirinya pengawasan yang dilakukan hanya berupa pemantauan dalam setahun terjadi dua kali yaitu sebelum pelaksanaan kegiatan dan akhir tahun anggaran dengan tujuan mengetahui perkembangan. Sebab tiap kelompok kerja tersebut mendapat bimbingan teknis dan bantuan dana.

Kemajuan berdasarkan kiriman laporan dari tiap kelompok kerja yang tidak seragam. Ada yang membuat laporan tri wulanan, enam bulanan, dan tahunan. Padahal berdasarkan aturan yang diterbitkan laporan harus dikirim minimal tri wulanan. Oleh karena itu secara menyeluruh belum diketahui, sehingga sementara ada yang melaksanakan kegiatan yang bagus dan ada pula yang melaksanakan kegiatan seadanya. Bahkan disinyalir ada kelompok kerja yang kurang serius melaksanakan kegiatan. Ini terjadi karena berbagai keterbatasan diantaranya belum ada pedoman pemantauan secara menyeluruh, dan terbatasnya sumber daya manusia yang ahli di bidangnya.

Penelitian dilakukan tahun 2015 di dua lokasi yaitu; *Family Care Unit* Sidomukti di Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur; *Family Care Unit* Selaras di Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawan Utara, Kota Singkawan, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian tentang pelaksanaan *Family Care Unit* menyimpulkan (Hikmawati, 2015). Kelembagaan *Family Care Unit* sebagai model pemberdayaan keluarga berbasis sinergitas potensi kesejahteraan sosial di daerah perkotaan/perdesaan adalah implementasinya telah berjalan baik. Walaupun masih terdapat kelemahan

terutama terkait dengan pemahaman masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap *Family Care Unit*. Nama *Family Care Unit* masih terasa asing di telinga masyarakat, sehingga pengelola harus bekerja keras untuk menjelaskan kepada masyarakat dan pihak terkait dalam implementasi *Family Care Unit*.

*Family Care Unit* telah dirasakan manfaatnya terutama bagi keluarga plasma karena merasa memiliki teman atau saudara untuk curahan hati dan tempat berbagi kesulitan. Kegiatan *Family Care Unit* telah berfungsi melakukan pemberdayaan sosial, konsultasi, dan informasi, advokasi dan rujukan, serta fungsi aksesibilitas. Faktor penghambat; Pertama, dukungan dari Dinas Sosial dan SKPD terkait belum maksimal, sehingga berpengaruh terhadap pendampingan program. Kedua, sumber daya pelaksana pada umumnya kurang dibekali teknik penanganan masalah terhadap keluarga plasma.

Kementerian Sosial memandang bahwa lembaga-lembaga pelayanan sosial yang ada di desa/kelurahan merupakan potensi yang dapat diberdayakan dengan optimal melalui sinergitas dan terintegrasi, maka dibentuklah *Family Care Unit*. *Family Care Unit* mendayagunakan keluarga pionir untuk memberdayakan keluarga plasma. Keluarga pionir memberikan penguatan kepada keluarga plasma agar dapat menghubungkan dengan pelayanan-pelayanan sosial. Pelaksanaan pemberdayaan menggunakan tenaga pendamping atau fasilitasi yaitu; Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LKKK) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) (Kementerian Sosial; 2012: 3 – 4).

Pemberdayaan adalah pemberian daya, wewenang, kepercayaan dan kemampuan kepada individu, kelompok dan kelembagaan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. *Family care unit* adalah aliansi dari berbagai lembaga pelayanan sosial keluarga di desa/kelurahan seperti Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), Karang Taruna,

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WSBM), Posyandu, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK), Lembaga pemberdayaan Keluarga (LPK), Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD), Unit Pelayanan Program Keluarga Sejahtera (UPPKS), kelompok agama, arisan, paguyuban, dan/atau para pegiat sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga (Kementerian Sosial, 2012).

Menurut Chilman (Su'adah, 2005), bahwa keluarga memiliki peran dan fungsi yang harus dilaksanakan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan anggota keluarganya. Menurut Goode (2007), mengartikan keluarga sebagai suatu unsur dalam struktur sosial dimana setiap anggotanya terkait dalam jaringan kewajiban dan hak. Keluarga mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya (Hikmawati, 2015). Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya. Keluarga harus diberikan penguatan agar dapat mengakses potensi dan sumber-sumber pelayanan. Pemberdayaan keluarga adalah proses peningkatan dan pemantapan motivasi, kemampuan dan fungsi keluarga yang dilaksanakan secara terencana, terarah dan sistematis, dan berlanjut melalui bimbingan, konsultasi, perlindungan, advokasi, pelebagaan keluarga dalam rangka memperkuat peran sosial keluarga (Kementerian Sosial, 2012).

Kebijakan Kementerian Sosial mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang terpusat dan terintegrasi serta mengoptimalkan sinergitas antar Potensi dan Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS). Harapan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga adalah mampu memberikan pelayanan kesejahteraan sosial atas inisiasi dan kekuatan lokal yang peduli terhadap kesejahteraan keluarga dalam wadah suatu aliansi. Disamping itu diharapkan terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di tingkat desa/kelurahan (Hikmawati, 2015).

Pengelolaan *Family Care Unit* terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota. Keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan. Sasaran lembaga pelayanan sosial ini yaitu; keluarga pionir dan keluarga plasma. Keluarga pionir adalah keluarga yang dapat menjalankan peran dan fungsinya, dapat mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif, serta dapat dijadikan sebagai teladan bagi keluarga lain yang memerlukan. Keluarga plasma adalah keluarga yang kurang mempunyai kemampuan untuk menjalankan peran dan fungsinya mengatasi masalahnya dalam menjangkau pelayanan sosial. Pelaksanaan kegiatan ditunjang dengan sarana dan prasarana diantaranya; kesekretariatan dan kelengkapan administrasi yang ditetapkan pengurus, memiliki program dan kegiatan terencana, serta dana stimulan dari Kementerian Sosial dan sumber dana lain yang dianggap sah.

Tugas dan peran terbagi untuk; Kementerian Sosial, Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan pelaksana *Family Care Unit*. Adapun kegiatannya selama setahun yang terdiri dari delapan tahapan yaitu; perencanaan kegiatan, identifikasi dan seleksi keluarga pionir, sosialisasi dan pemantapan keluarga pionir, identifikasi dan seleksi keluarga plasma, sosialisasi dan pemantapan keluarga plasma, identifikasi sistem sumber dan pusat-pusat pelayanan, pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial, dan pelaksanaan rujukan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok sosial sangat ditentukan pengurus dan pelaksanaan kegiatan. Menurut Merton (1968) dengan acuan pada interaksi sosial, kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain dengan suatu cara yang sudah berpola, dan merasa bahwa mereka termasuk dalam kelompok itu dan dianggap oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Diyakini (Ife, 2002), hadirnya pelayanan berbasis masyarakat akan menempatkan dasar-dasar yang kuat dalam mengembalikan keberadaan sistem

sosial yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kesinambungan ekologi (Aep, 2007).

Ife (2003) mengemukakan bahwa unsur dasar dari institusi sosial di dalam komunitas adalah modal sosial yang merupakan hubungan sosial antar individu dalam komunitas yang diorganisir secara sistematis yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang ada di lingkungannya yang dilandasi oleh nilai sosia, kepedulian sosial, dan jaringan sosial. Peranan institusi sosial dipandang menjadi media pelibatan masyarakat dan sekaligus sebagai sarana proses belajar untuk bertindak bagi masyarakat yang terlibat (Ramli, 2007).

Dinamika lembaga sosial memiliki Kecenderungan positif, yaitu melembaganya kepedulian warga untuk mengembangkan potensi daerah dengan berusaha menghidupkan kembali identitas lokal. Pihak pemerintah dan masyarakat merespon positif pendirian perkumpulan itu karena memberikan sumbangan bagi potensi pariwisata dan mendukung swdaya dan partisipasi masyarakat. Namun dinamika ini juga memiliki kecenderungan negatif yaitu masyarakat enggan memanfaatkan institusi lokal karena program dan kegiatan yang ditawarkan kurang menarik juga keterlibatan mereka dirasakan kurang memberikan dampak positif pada hasil akhir. Adanya keraguan masyarakat tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan karena adanya perbedaan kepentingan yang diprioritaskan, sehingga tidak terjadi kata sepakat tentang skla kebutuhan. Insitusi lokal tidak mampu menjadi mediasi. Adanya rasa cemas dan takut masyarakat akan terjadinya perubahan yang mengganggu keseimbangan hidup mereka (Syarif Muhidin, 2004)

Strategi pengembangan institusi lokal menurut Uphoff (Ramli, 2007) adalah asistensi. Strategi ini digunakan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan masalah pada institusi lokal yang kemudian dibuat perencanaan pengembangan kapasitas institusi lokal tersebut. Fasilitasi, strategi ini digunakan apabila institusi lokal ni

mengalami kekurangan inistatif untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Promosi, strategi promosi digunakan apabila ada pihak luar yang berkeinginan untuk memperkuat institusi lokal tersebut dengan mengembangkan program yang lebih prospektif.

Berdasarkan pendapat informan tersebut, keberhasilan kegiatan yang dilakukan kelompok kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain; kelembagaan, pengurus, dan sarana. Kelembagaan dan pengurus terlebih dahulu dibentuk sesuai dengan rencana yang diterapkan pada tahun 2013 atau 2014. Sarana dimaksudkan bantuan dana bersifat stimulan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan dimulai dari alat tulis kantor, konsumsi, dan lain-lain.

Keterbatasan data dan informasi tentang kemajuan kelompok kerja tersebut, memerlukan penelitian atau kajian terhadap beberapa kelompok kerja, sehingga perlu dijelaskan permasalahan sebagai pijakannya. Permasalahannya ialah bagaimana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga, dan apa yang menjadi faktor berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Tujuan Penelitian menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan.

## 2. MATERIAL DAN METODE

Kajian ini bersifat studi kasus terhadap kelompok kerja Ken Tawar di Kabupaten Aceh Tengah. Pemahaman terhadap kasus yang diamati sesuai dengan keperluan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, diskusi, dan pengamatan.

Lokasi kajian ditentukan secara sengaja (*Purposive*) di Provinsi Aceh. Kelompok kerja yang perlu terhadap keluarga diresmikan dengan nama Kelompok Kerja *Family Care Unit* Ken Tawar yang berada di Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Lokasi ini sekitar 400 Km dari Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh. Ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan bermotor roda empat selama sembilan jam.

Sumber data, unit analisis sebagai informan yang ditentukan yaitu; diperoleh dari pengurus kelompok kerja, dua orang dari keluarga pionir, dan tiga orang dari keluarga plasma. Data yang diperlukan berupa informasi atau keterangan tentang pelaksanaan kegiatan. Keterangan diperoleh melalui sebuah pedoman wawancara dan pengamatan. Pengamatan secara langsung dilakukan dua kali. Pertama, akhir tahun 2014 melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Kedua, awal tahun 2016 dalam rangka melakukan evaluasi kegiatan. Kunjungan kedua berlangsung selama lima hari yang digunakan untuk mendalami pelaksanaan kegiatan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN METODE

Secara umum di Propinsi Aceh bentuk pemerintahan daerah bertingkat yaitu; kabupaten dan kecamatan. Di bawahnya terdiri atas: *mukim* dan *kampung*. Daerah *mukim* merupakan kumpulan kampung-kampung dan dikepalai oleh seorang *imeum*. Daerah *kampung* (Aceh : *gampong*) setingkat desa merupakan pemerintahan terbawah dikepalai seorang dengan sebutan *reje* atau *pengulu*. Ada juga yang menyebutnya *geucik*, istilah umum yang berlaku di seluruh daerah Aceh. Hanya beberapa ibukota kecamatan ada satu kelurahan yang diangkat berdasarkan keputusan bupati setempat (Jayaputra; 2012: 46; Banta, dkk: 2014).

Kampung Lelabu merupakan bagian dari Kecamatan Bebesen yang termasuk wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Ibukota kabupaten yaitu Takengon yang terletak di tepi Danau Laut Tawar. Danau ini merupakan danau terluas kedua di Indonesia dan terluas kedua di Pulau Sumatera. Kabupaten ini dikenal juga dengan sebutan Tanah Gayo karena terletak di Dataran Tinggi Gayo. Secara geografis Kampung Lelabu terletak di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Luas wilayahnya 150Ha atau setara dengan 1.500 Km<sup>2</sup>. Batasnya yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kampung Tensaran, sebelah selatan berbatas

Kampung Tansaril atau Kampung Umang, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Burbiah, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kebet.

Penduduk di Kampung Lelabu berjumlah 118 Kepala Keluarga terdiri atas 437 jiwa, laki-laki 214 jiwa (48,97 %) dan perempuan 223 jiwa (51,03 %). Penduduk tersebut terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli merupakan Orang Gayo yang mendiami kampung tersebut sudah secara turun temurun. Sebagian sudah merantau keluar dari wilayah kabupaten dan ada yang sampai ke Pulau Jawa. Diantara penduduk setempat ada yang sudah kawin dengan penduduk pendatang. Penduduk pendatang yang terdiri dari pendatang yang tinggal di kampung tersebut. Diketahui pendatang seperti: orang Jawa, orang Aceh, dan orang Minangkabau. Keberadaan pendatang terkait perkawinan dengan penduduk setempat dan sebab lain seperti membuka usaha dan tinggal mengontrak atau menyewa rumah.

Secara sosial budaya kehidupan sehari-hari penduduknya sangat dipengaruhi unsur kebudayaan Gayo. Diantaranya; masih kuatnya dalam pengamalan adat istiadat karena unsur masyarakat terdiri dari empat unsur (sarak opat): kepala kampung (*reje*), orang-orang tua (*petue*), ulama (*imeum*), dan wakil warga (*rayat*). Tiap unsur mempunyai tugas dalam masyarakat terkait dengan agama dan adat istiadat. Perkawinan dengan tata cara setempat mulai dari tahap melamar sampai dengan pakaian adat Gayo (*kerawang*). Penggunaan bahasa Gayo sebagai bahasa utama dan dalam keadaan tertentu menggunakan bahasa Indonesia. Perubahan yang mulai terasa dalam penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan di sekolah dan ketika berbicara dengan selain orang Gayo (Jayaputra; 2012). Kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang menjadi kebiasaan dan dapat dipelajari dari masyarakat. Ketika kebudayaan masih bermanfaat bagi masyarakat maka kebudayaan tersebut akan terus menerus dipakai. Jika tidak maka kebudayaan

tersebut akan bertransformasi mengikuti perkembangan masyarakat atau hilang (Shamadiyah, et.al., 2017).

Sebagian besar (80 %) bekerja di sektor pertanian. Terutama mereka menanam kopi sebagai mata pencaharian pokok. pekerjaannya tambahnya sebagai petani yang menanam sayuran dan buah-buahan. Banyak juga yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai buruh tani. Selebihnya sebagai pedagang (10 %) dan jasa (10 %). Pedagang membuka warung yang menjual makanan dan minuman, serta membuka toko yang menjual kebutuhan pokok penduduk setempat. Sektor jasa antara sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai Swasta, ABRI dan Polisi (Banta, dkk, 2014).

Lembaga FCU Ken Tawar telah dibentuk tanggal 9 September 2013. Pembentukan dihadiri unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat. Unsur pemerintahan dari; Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Aceh, dan Dinas Sosial Provinsi Aceh, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tengah. Tokoh masyarakat terdiri dari; TKSK, tokoh adat dan tokoh agama.

Lembaga ini diresmikan berdasarkan Keputusan Reje Lelabu Nomor 467/14/SK/LLB/2013 tertanggal 30 November 2013 Tentang Susunan Pengurus Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu (UPKST) Ken Tawar, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Pengurus terdiri dari; Pembina, Pengurus Harian, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Keluarga Pionir. Lembaga yang peduli terhadap keluarga sangat terbatas karena hanya instansi pemerintah terdekat yang dapat dihubungi seperti Camat Bebesen, Kepolisian Sektor Bebesen dan Koramil Bebesen. Kepedulian tersebut belum menunjukkan kemajuan karena belum semua instansi pemerintah mengetahui keberadaan lembaga pelayanan keluarga. Demikian juga, masyarakat belum banyak mengenal lembaga baru tersebut.

Terdapat 13 kegiatan yaitu (Banta, 2014) yang terdiri dari Rapat Teknis, Rapat Penentuan Keluarga Pionir Sosialisasi FCU

pada masyarakat, Sosialisasi PKST bagi PSKS, Sosialisasi terhadap keluarga pionir dan keluarga Plasma, Kunjungan Keluarga Pionir ke Keluarga Plasma, Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Identifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Rapat Pengolahan Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Rapat Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Penyuluhan Sosial, Bimbingan Teknis, dan Pelatihan Perencanaan Partisipatif.

Pada tahun 2014 terdapat tiga kegiatan, yaitu berupa kunjungan antar rumah (*Home visit*) oleh Pengurus Ken Tawar ke keluarga Pionir untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh Keluarga Plasma. Setelah kegiatan penjangkauan ada beberapa hal yang dibahas untuk secara terpadu dengan lembaga pemerintah Kampung Lelabu. Memberikan solusi dari kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga plasma, sekaligus mencari pemecahan masalah yang dihadapi. Pemenuhan kebutuhan kesekretariatan diperlukan sebagai penunjang antara lain: papan nama, susunan pengurus, alat tulis kantor, spanduk (*banner*) sosialisasi kegiatan, *flas disk*, papan tulis, dan lain-lain. Berdasarkan keterangan dan dokumentasi di Kementerian Sosial laporan yang dibuat Pengurus FCU Ken Tawar belum lengkap karena lebih banyak laporan administratif seperti Surat Keputusan, daftar hadir, pengeluaran dana, foto, dan lampiran-lampiran lainnya. Hanya notulen rapat sebagai bahan untuk mengukur kemajuan. Pengurus belum banyak melakukan kegiatan yang terkait dengan keluarga pionir dan keluarga plasma. Padahal kegiatan ini yang sangat penting, sehingga akan memberi nilai tambah dalam pelaksanaan kegiatan.

Laporan pengurus dalam pertemuan ada tiga contoh yang dianggap positif dan baik. Bapak Ibrahim Isa sebagai tokoh masyarakat dan keluarga pionir yang bekerjasama dengan DPRK Aceh tengah dan PDAM mengupayakan penyaluran air

bersih terhadap 15 keluarga plasma. Bapak Abdul Kadir sebagai pengusaha kopi dan keluarga pionir telah menghimpun 33 orang terdiri dari kaum ibu 30 orang dan kaum laki-laki tiga orang. Mereka sebagai pekeja lepas dalam memilah biji kopi dengan upah yang ditetapkan berdasarkan harian dan banyaknya biji kopi yang dipisahkan secara perorangan. Ibu Nurlela sebagai tokoh agama kaum perempuan dan keluarga pionir telah membina kaum ibu dan anak-anak melaksanakan pengajian dua kali dalam seminggu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pada tahun 2013 diterima dana sebesar Rp 12.000.000,- telah digunakan untuk mendukung selama setahun. Ada tiga besaran kegiatan yang dilakukan yaitu; operasional kegiatan sebesar Rp 2.400.000,-, penyediaan konsumsi rapat sebesar Rp 4.800.000,-, dan dua kali kunjungan terhadap 10 keluarga plasma. Tetapi laporan tahun 2014 dan 2015 tidak diperoleh.

Tersedianya dana kegiatan merupakan salah satu faktor pendukung pada program pemberdayaan keluarga. Dana yang berasal dari Kementerian Sosial selama dua tahun secara terus menerus dianggap cukup untuk mendukung seluruh kegiatan. Potensi sosial setempat sangat mendukung kegiatan pelayanan keluarga. Sumber daya alam berupa masih luasnya tanah pertanian dan dapat digunakan untuk keperluan lain, terutama peternakan. Sumber daya manusia yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dapat menjadi tenaga kerja dalam pertanian dan sektor informal. Adanya anggota keluarga yang sudah berkeluarga hanya menjadi ibu rumah tangga, sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang bekerja di wilayahnya sendiri. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluarga muda atau kawin dalam usia muda.

Peran serta Dinas Sosial setempat dianggap kurang karena tidak memberikan kegiatan dari bidang lain untuk mendukung pelaksanaan pelayanan keluarga. Selain itu belum bisa mengajak lembaga lain yang setara untuk ikut serta dalam kegiatan pelayanan keluarga. Kelompok kerja yang

dibentuk juga terlalu banyak kegiatan. Padahal ketika dilakukan pemantauan sudah diarahkan agar mengutamakan permasalahan keluarga plasma yang dilakukan oleh keluarga pionir. Kegiatan yang dilakukan belum bisa mengajak orang peduli untuk membantu pelaksanaan pelayanan keluarga yang bermasalah. Dalam pendampingan, seharusnya dilakukan *focus group discussion* (FGD) agar keluarga petani dapat memetakan secara swadaya tentang permasalahan dan potensi, sehingga dapat diketahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di lokasi kelompok kerja (Shamadiyah dan Kaliky, 2016). Sehingga akan memudahkan untuk merencanakan kegiatan pendampingan selanjutnya.

#### 4. KESIMPULAN

Dilihat dari pemberdayaan keluarga melalui *Family Care Unit*. Kelembagaan terbentuknya pengurus harian sangat ramping. Hanya permasalahan yang harus diselesaikan terlalu luas terkait dengan sosial budaya seperti hanya tiga tokoh masyarakat yang berperan serta. Kurangnya pemahaman instansi sosial dan instansi terkait. Pembinaan FCU sepenuhnya ada di Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat – Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tengah. Banyak instansi terkait yang belum tahu kelompok peduli keluarga. Kecuali TKSK yang membantu mendampingi pelaksanaan kegiatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Banta, A, dkk. 2014. *Laporan Pelaksanaan dan Kegiatan Family Care Unit Ken Tawar Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah*. Takengon: Kelompok Kerja Ken Tawar.
- Djalil, B. 2011. *Kepemimpinan Gayo dalam Perspektif Sosio Religius*. Jakarta: Qalbun Salim.
- Hikmawati, E. 2015. *Family Care Unit. Model Pemberdayaan Keluarga Berbasis Sinergitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Jayaputra, A. 2012. *Keragaman Suku Bangsa dan Pranata Sosial masyarakat Indonesia*. Jakarta: UMJ Press.
- ..... 2015. *Pemantauan Family Care Unit Ken Tawar Kampung Lelabu, Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Laporan Dinas Pusbangtansosmas*. Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Kementerian Sosial. 2012. *Pemberdayaan Keluarga melalui Family Care Unit*. Jakarta: DPKKS.
- ..... 2013a. *Pedoman Uji Coba Mdel Sinergitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berbasis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Model Pemberdayaan Keluarga melalui Family Care Unit*. Jakarta: DPKKS.
- ..... 2013b. *Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta; Puslitbangkesos.
- ..... 2014. *Pedoman Standarisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial*. Jakarta; Dit PPKS.
- ..... 2016. *Survei Kesejahteraan Sosial Dasar*. Jakarta; Puslitbangkesos
- ..... 2017. *Panduan Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat*. Jakarta: DIT PSPKKM.
- Komaruddin, 1984. *Kamus Riset*. Bandung: Angkasa.
- Purnama, A, dkk. 2015. *Efektivitas Model Pemberdayaan Keluarga Melalui Family Care Unit*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Ramli. 2007. "Institusi Lokal sebagai Modal Sosial" dalam *Modal Sosial dalam Pembangunan Sosial* (Editor: Bambang Sugeng, dan Badrun Susantyo), 81 -102.
- Rusmana, A. 2007. "Modal Sosial dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Lokal" dalam *Modal Sosial dalam Pembangunan Sosial* (Editor: Bambang Sugeng, dan Badrun Susantyo), 15 - 32.
- Shamadiyah, N., Rahima Kaliky. 2016. "Strategi Pembangunan Masyarakat Partisipatif dengan Pemasaran Sosial (Studi Kasus Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kelurahan Suryatmajan Kota Yogyakarta)". *Prosiding Seminar Nasional Lustrum Ke-2 Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada "Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)"* Hariadi, Sunarru S. et al. (ed),--. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Shamadiyah, N., Martina, Riyandhi Praza. "The Role of Fishing Technique with Tuah Teng on Food Security in Facing the Era of Asean Economic Community". *Malikussaleh International Conference on Mutidisiplinary Studies*. Aceh Utara: Universitas Malikussaleh.
- Sutrisno, E. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cetakan Kelima). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.